

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Korea, sebuah negara kecil yang terletak di kawasan Asia Timur Jauh, dikelilingi oleh empat negara raksasa di dunia, seperti Cina, Jepang, Rusia dan Amerika Serikat. Negara itu terbagi menjadi dua negara, yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Terbaginya Korea menjadi dua bagian ini merupakan simbol warisan persaingan ideologi di masa Perang Dingin. Pertentangan antara Korea Utara dan Korea Selatan mengenai perbedaan ideologi mereka (komunisme dan sosialisme) selalu menjadi pusat perhatian masyarakat internasional, hal ini sangat memprihatinkan mengingat sesungguhnya kedua negara Korea itu merupakan satu bangsa. Hingga saat ini Korea Utara berhasil membuka mata dunia internasional untuk selalu tertuju kepadanya, yaitu dengan membuat upaya kontroversial seperti isu nuklir atau pengembangan kekuatan persenjataan. Hal ini bertentangan dengan strategi Korea Selatan dalam memperoleh perhatian di masyarakat internasional.

Perkembangan Ekonomi Korea Selatan mengesankan karena minim sumber daya alam, tetapi sangat mengandalkan sumber daya manusia yang ditopang oleh perhatian besar pada bidang pendidikan. Lebih mencengangkan lagi, Korsel dapat membangun ditengah situasi konflik Semenanjung Korea dengan Korea Utara yaitu Perang Korea tahun 1951-1953. Pada awal tahun 1960-an Korea Selatan tidak populer dalam masyarakat internasional. Semua

berawal dari kepemimpinan militer Park Chung Hee di tahun 1961, sebagai pemegang tonggak pertumbuhan industri dan ekonomi di Korea Selatan. Dalam masa pemerintahan Presiden Park, di akhir tahun 1970-an, Korea Selatan mulai tampil di kalangan masyarakat internasional akibat keberhasilannya dalam pertumbuhan ekonomi dan memberantas kemiskinan dalam waktu yang cukup singkat.<sup>1</sup> Tahun 1962, pendapatan per kapita penduduk Korea Selatan sekitar US\$ 87 (waktu itu setara dengan Ghana dan India).<sup>2</sup> Pada 1963, pendapatan per kapita dicapai sebesar US\$100. US\$14.162 pada 2004, hingga di tahun 2005 mencapai US\$16.291.<sup>3</sup> Sejak pertengahan tahun 1990-an Korsel mengejutkan negara-negara Barat dengan mengembangkan teknologi canggih dalam bidang industri modern yang merupakan hasil kreatifitas perusahaan-perusahaan swasta tersebut, yang sering disebut Chaebol.

*Chaebol* (jae-bol) adalah istilah bahasa Korea untuk konglomerat, yang telah menjadi kekuatan ekonomi utama dalam ekonomi Korea Selatan dari berakhirnya Perang Korea sampai sekarang ini. Pada 40 tahun terakhir, Chaebol memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah mengembangkan industri, pasar dan ekspor baru. Hal ini telah menjadikan Korea Selatan menjadi salah satu ekonomi industri baru (*newly industrializing country's*, NIC's) dan

---

<sup>1</sup> Disampaikan oleh Yang Seung-Yoon, Ph. D, dalam *International Seminar "South Korea in the Constellation of Pacific Regional Political Power"*, 15 November 2005, UMY, Yogyakarta.

<sup>2</sup> <http://www.mail-archive.com/warnet2000@yahoo.com/msg00203.html>. diakses pada tanggal 5 Desember 2006.

<sup>3</sup> *Korsel mencari peran ekonomi dalam APEC*, sumber:<http://www.detikinet.com/index.php/>

meningkatkan standar hidup menyamakan dengan negara maju lainnya<sup>4</sup>.

Beberapa Chaebol terkenal antara lain :

1. Hyundai (termasuk Kia)
2. Samsung
3. LG (Lucky Goldstar)
4. SK Group
5. SsangYong
6. Daewoo
7. Hanjin
8. Lotte
9. Cheil Jedang

Chaebol sebagai perusahaan multinasional berbasis industri dan teknologi telah berjasa secara langsung terhadap perkembangan ekspor Korea Selatan. Khusus elektronik, Korsel tercatat sebagai negara terbesar keempat dalam ekspor elektronik digital setelah Jepang, Amerika Serikat, dan China. Selain itu penjualan produksi Korea, seperti kapal, mobil, dan baja ke luar negeri makin meningkat. Terutama ekspor ke negara Uni Eropa, Brasil, India, dan China.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tindakan pemerintah dalam mengatasi peran chaebol yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Korea Selatan, yang disusun dalam suatu judul skripsi, yaitu :

---

1

## **“PERAN PEMERINTAH DALAM POLITIK PEREKONOMIAN KOREA SELATAN (Studi Kasus :Chaebol)”**

### **B. Latar Belakang Masalah**

Korea Selatan pada tahun 2005, berada dibawah kepemimpinan Presiden Roh Moo Hyun yang memimpin sejak tanggal 25 Mei 1993. Saat itu disamping merupakan pemimpin dalam akses internet kecepatan-tinggi, semikonduktor memori, monitor layar-datar dan telepon genggam, Korea Selatan berada dalam peringkat pertama dalam pembuatan kapal, ketiga dalam produksi ban, keempat dalam serat sintetis, kelima dalam otomotif dan keenam dalam baja. Negara ini juga dalam peringkat ke-12 dalam PDB nominal, tingkat pengangguran rendah, dan pendistribusian pendapatan yang relatif merata. Namun ternyata dibalik keberhasilan itu, Korea Selatan pernah mengalami resesi Krisis Finansial yang juga melanda beberapa negara di Asia pada tahun 1997.

“Keajaiban Sungai Han” atau *Miracle on the Han River* merupakan julukan bagi Korea Selatan yang telah berhasil membangun perekonomiannya secara mengejutkan. Republik Korea (*Daehan Minguk/Republic of Korea/ROK*) biasanya dikenal sebagai Korea Selatan, adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan Semenanjung Korea. Di sebelah utara, Republik Korea berbatasan dengan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Jepang berada di seberang Laut Jepang (disebut "Laut Timur" oleh orang-orang Korea) dan Selat Korea berada di

bagian tenggara. Negara ini dikenal dengan nama *Hanguk* oleh penduduk Korea Selatan. Dalam waktu kurang lebih 40 tahun pembangunan di Korea Selatan berkembang, dari sistem ekonomi tradisional menuju sistem ekonomi liberal dan modern, hingga akhirnya Korea Selatan menjadi salah satu Negara Industri Baru (NIB) atau *Newly Industrializing Countries* (NICs).

Walden Bello dan Stephanie Rosenfeld mengemukakan adanya tiga faktor yang sangat penting dalam mengantarkan keberhasilan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan menjadi salah satu negara NIC's (*Newly Industrializing Countries*), yaitu: hubungan khusus dengan AS, keterkaitannya dengan Jepang, dan intervensi pemerintah dalam pembangunan.<sup>5</sup>

#### 1. Hubungan dengan Amerika Serikat

Keberhasilan pembangunan ekonomi dan kemunculan Korea Selatan menjadi NIC pada masa sistem perdagangan dunia di bawah hegemoni AS. Pada 1945-1978 merupakan masa rekonstruksi ekonomi Korea Selatan, negara itu menerima dana bantuan dari AS yang sangat besar, yaitu total sebesar 6 milyar dollar. Lebih dari 80 % impor Korea Selatan dibiayai dengan bantuan ekonomi AS. Pada masa Perang Vietnam, AS memberi stimulus bagi Korea Selatan untuk melaksanakan tinggal landas dalam pembangunan ekonomi, yaitu AS membeli hasil pertanian dan komoditi industri Korea Selatan, dan AS mengadakan kontrak kerja dengan perusahaan Korea Selatan (Hyundai) bagi

---

<sup>5</sup> Walden Bello & Stephanie Rosenfeld, *Dragons in Distress: Asia's Miracle Economies in*

perusahaan lokal di Vietnam. Pada akhir Perang Vietnam di tahun 1975, kontrak kerja di luar negeri perusahaan-perusahaan swasta Korea Selatan telah mencapai total sebesar 850 juta dollar.

## 2. *Keterkaitan dengan Jepang*

Sejak masa penjajahan Jepang di Korea Selatan, Jepang telah membangun infrastruktur perekonomian dan industri-industri dasar di Korea Selatan. Hal ini menjadi aset vital bagi Jepang ketika pada tahun 1960-an dan 1970-an banyak perusahaan Jepang yang beralih ke Korea Selatan untuk mencari biaya buruh yang lebih rendah. Jepang menyumbangkan transfer teknologi yang digunakan bagi pembangunan perusahaan industri mainan dan manufaktur Korea Selatan lainnya. Transfer teknologi itu mengantarkan Korea Selatan dalam melakukan tinggal landas dalam pembangunan ekonomi pada tahun 1970-an. Namun demikian, Korea Selatan menjadi tergantung pada Jepang dalam hal memperoleh izin penggunaan teknologi Jepang untuk mencapai keberhasilan dalam ekspor produk manufaktur Korea Selatan.

## 3. *Intervensi Pemerintah dalam Pembangunan*

Intervensi pemerintah dalam kegiatan perekonomian Korea Selatan yang berbentuk *state command capitalism*, yaitu pembangunan ekonomi Korea Selatan dilaksanakan di bawah pengarahan elit penguasa. Elit teknokrat menentukan arah kebijakan ekonomi dan tanpa ragu-ragu memberi subsidi, akses bagi kredit, *incentive* investasi untuk mencapai target produksi yang ditetapkan. Pemerintah juga melakukan

campur tangan dalam masalah buruh untuk menekan upah buruh sampai di bawah nilai pasar dengan tujuan untuk mencapai keuntungan kompetitif bagi ekspor Korea Selatan di pasar internasional. *State command capitalism*, menurut Bello & Rosenfeld, bukan merupakan sistem kapitalisme pasar bebas, melainkan sistem yang menjadikan negara-negara *NICs* menjadi pemain utama dalam sistem perekonomian dunia.

Selama lepas dari penjajahan kolonial Jepang, Korea Selatan telah berhasil melakukan restrukturisasi perekonomiannya dari negara dunia ketiga menjadi negara industri maju dalam waktu yang relatif singkat. Selama itu pula peran konglomerat sebagai industriawan (*Chaebol*) dibutuhkan sebagai agen pembangun negara. Pada periode awal pertumbuhan ekonomi hingga era Presiden Roh Tae Woo perwakilan kepentingan berada dalam sistem korporatis negara, sehingga peran negara sebagai panglima sangat diutamakan terutama dalam politik dan perekonomian. Dalam perekonomian negara menerapkan hubungan erat demi pembangunan ekonomi, dengan beberapa kebijakan yang cenderung menguntungkan perusahaan-perusahaan besar (*Chaebol*). Beberapa kebijakan tersebut antara lain dengan menerapkan kredit langsung, pembatasan impor, sedangkan perusahaan kecil-menengah kurang diperhatikan. Namun disamping itu *Chaebol* juga harus mendukung kampanye dengan dana sukarela kepada partai yang berkuasa, sehingga hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan negara menjadi tidak sehat dan menimbulkan korupsi

Peran Chaebol sangat vital dan merupakan parameter pembangunan ekonomi Korea Selatan. Chaebol menguasai industri-industri strategis di Korea Selatan, yaitu industri manufaktur dan konstruksi yang merupakan industri andalan ekspor negara Korea. Dari industri-industri tersebut, Korea Selatan banyak mendapatkan investor asing dan devisa negara. Dari besarnya peran Chaebol dalam perekonomian tersebut, maka pemerintah tidak dapat menghentikan kinerja Chaebol. Jika Chaebol mati maka perekonomian Korea Selatan pun akan mati. Sebagai contoh, di tahun 1995, sebanyak 30 Chaebol terbesar menyumbangkan 16% GDP Korea Selatan, menambah nilai di sektor manufaktur sebesar 41% dan 50% dari ekspor. Di antara 30 Chaebol terbesar saat itu, Hyundai, Samsung, LG dan Daewoo sebagai *Top Four Chaebol* yang paling mendominasi naiknya indikator ekonomi dengan menyumbangkan 9% GDP Korea Selatan di tahun 1995 tersebut.<sup>6</sup> Samsung merupakan salah satu Chaebol yang paling berpengaruh dengan menyumbang 8% pendapatan dari pajak dan lebih dari 20% ekspor.<sup>7</sup>

Desember tahun 1992 merupakan masa yang paling penting di sejarah Korea, ketika Kim Young Sam terpilih sebagai Presiden Demokrasi Sipil. Mulai tahun 1993, ia mereformasi perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan demokratisasi, ia bahkan menghukum Presiden sebelumnya yang terlibat suap yaitu Chun Doo Hwan dan Roh Tae Woo, dengan menerapkan

---

<sup>6</sup> Sumber: [http://www.economywatch.com/world\\_economy/south-korea/export-import.html](http://www.economywatch.com/world_economy/south-korea/export-import.html), diakses pada tanggal 5 Juni 2007.

<sup>7</sup> Korea Selatan: Rahasia keberhasilan ekonomi Macan Asia, sumber: <http://asiacalling.kbr68h>



kebijakan “*Restrukturisasi 94*”. Cara pemerintahan Kim Young Sam berbeda dari Presiden-presiden Korea sebelumnya, ia mengurangi kekuasaan negara sehingga kelas menengah meningkat sehingga buruh mulai berpengaruh dalam sistem pemerintahan Korea. Hubungan pemerintah dengan pengusaha masih terjalin namun dibatasi untuk keuntungan keduanya dan rakyat. Pada masa pemerintahannya, Presiden Kim Young Sam mencanangkan apa yang disebut sebagai “*ekspansi global*”, sehingga para chaebol makin leluasa masuk negeri lain, mulai saat itu para Chaebol semakin mantap beralih fungsi dari perusahaan swasta nasional menjadi perusahaan multinasional.

Kebijakan ekspansi global yang diterapkan Kim Young Sam membuat produk-produk buatan Korea Selatan semakin dikenal masyarakat internasional, tidak mengherankan bila kiprah bisnis Korea Selatan bisa ditemui di banyak pelosok negeri. Sejak 1994, KIA dan Hyundai adalah dua dari sejumlah Chaebol Korea Selatan yang bersaing di pasar Amerika.<sup>8</sup> Selain mereka juga ada Samsung, Daewoo, dan Lucky GoldStar. Sejak saat itu Amerika praktis menjadi tempat utama investasi Korea Selatan di luar negeri. Sasaran lain adalah negara-negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Produk otomotif Daewoo, misalnya, telah mengisi pasar Eropa Timur, Amerika Latin, Afrika, dan Asia Barat. Tapi Chaebol Korea Selatan tidak hanya menjual otomotif, mereka juga memasarkan hasil industri perkapalan, kimia, komputer, suku cadang pesawat, dan elektronika. Pemerintah mempromosikan impor bahan

---

<sup>8</sup> Chaebol Berpayung Pejabat. Produk industri Korea Selatan kini membanjiri pasar dunia. Pemerintah dukung penuh para Chaebol, sumber:<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata>

mentah dan teknologi demi barang konsumsi dan mendorong tabungan dan investasi.

Sejak bergabung dengan PBB awal tahun 1991, Korea Selatan harus menkonversi kebijakan ILO, hal ini menyebabkan buruh mulai melancarkan aksi demo menuntut kesejahteraannya. Di masa pemerintahannya, Kim Young Sam terlalu memberikan tekanan terhadap rakyat terutama buruh, di sisi lain justru memberikan ruang terhadap konglomerat untuk beroperasi secara tidak sehat dan menimbulkan hutang di sana-sini. Akibatnya, krisis yang sebelumnya dapat terkendali, karena negara menjamin distribusi pangan bagi semua lapisan masyarakat, berubah menjadi krisis legitimasi terhadap pemerintahan Young Sam.

Suburnya kapitalisme perkoncoan (*crony capitalism*), membuat struktur ekonomi Korea Selatan sangat rapuh menghadapi gejolak-gejolak eksternal. Industri manufaktur sangat tergantung pada bahan baku impor dan tidak mempunyai daya saing yang kuat. Akibatnya, kredibilitas pemerintah Kim Young Sam, bertambah merosot. Hal ini diperparah oleh serangkaian tindakan pemerintah Kim Young Sam dalam merespon gejolak sosial, bersifat menekan, walaupun dalam kadar tertentu.<sup>9</sup>

Krisis Finansial Asia 1997 membuka kelemahan dari model pengembangan Korea Selatan, termasuk rasio utang yang besar, pinjaman luar yang besar, dan sektor finansial yang tidak disiplin. Kisah kehancuran

---

<sup>9</sup> Belajar dari Korea Selatan, Oleh Gregorius Sahdan, sumber: <http://www.sinarharapan.co.id/>



### **C. Pokok Permasalahan**

Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi dominasi peran Chaebol dalam perekonomian di Korea Selatan?

### **D. Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan, antara lain :

1. Memenuhi mata kuliah skripsi yang digunakan sebagai syarat guna meraih gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Mengemukakan dan menjelaskan aktor-aktor ekonomi politik serta perannya, dalam hal ini pemerintah Korea Selatan dan chaebol di dalam perekonomian Korea Selatan.
3. Menerapkan teori dan ilmu yang telah didapat dalam perkuliahan dalam rangka pengembangan wawasan dan intelektual penulis, untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai sebuah bentuk karya dari mahasiswa dalam sebuah proses mengamati sebuah fenomena

## E. Kerangka Dasar Pemikiran

Kerangka dasar pemikiran pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis menentukan arah dan tujuan penulisan serta memilih konsep untuk menyusun hipotesa. Untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah di atas, penulis akan menggunakan alat bantu pemikiran berupa teori dan konsep yang berkaitan erat dengan judul yang dipilih oleh penulis.

### 1. Konsep *Developmental State*

*Developmental State* adalah sebuah konsep yang dikemukakan oleh ahli-ahli ekonomi politik internasional, ketika melihat fenomena yang terjadi di Asia Timur<sup>11</sup> (khususnya), walaupun di negara-negara maju di Eropa juga ditemukan konsep *developmental state*.

*Developmental state* merupakan pengutamaan peran negara dalam proses pembangunan ekonomi, terutama dalam hal industrialisasi. *Developmental state* dapat diimplementasikan pada sistem politik berbeda-beda, baik yang otoriter maupun demokratik.

Adapun ciri-ciri umum dari teori *Developmental State* ini, yaitu:

- a. Besarnya legitimasi birokrasi pemerintah.
- b. Aliansi antara negara, buruh dan pengusaha.
- c. Prioritas pertumbuhan ekonomi di atas pembangunan politik.
- d. Fokus pada transfer teknologi.
- e. Proteksi terhadap industri domestik.

Ciri-ciri *developmental state* dapat dijelaskan pada perkembangan dua model teori sebagai berikut :

a. *Developmental state* yang dipelopori oleh **Chalmers Johnson**.

Menurutnya *developmental state* adalah sistem pengendalian yang dilakukan oleh negara terhadap proses industrialisasi melalui sekelompok kecil elit ekonomi politik yang cerdas dan otonom. Johnson mempercayai bahwa untuk melaksanakan pembangunan ekonomi atau industrialisasi yang efektif maka diperlukan pemerintah yang kuat dan terpisahkan (*insulated*) dari masyarakat dan segala permasalahannya. Industrialisasi dibangun dengan rekrutmen sejumlah orang-orang pintar dalam bidang manajemen industri, yang keputusannya mempunyai legitimasi tinggi terhadap lembaga-lembaga negara yang terkait industrialisasi (otonomi).<sup>12</sup> Pada versi ini otoriterisme sangat diterapkan demi kelancaran dan keamanan proses industrialisasi, namun tuntutan masyarakat untuk lebih demokratik menyebabkan otonomi yang ada pada kelompok elit yang semula harus dimiliki untuk mempercepat industrialisasi harus direvisi atau justru dihilangkan sama sekali.

---

<sup>12</sup> *Op. cit.*, hal. 147-148. *Chalmers Johnson, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1983*.

b. *Developmental state* yang dipelopori oleh **Peter Evans**.

Evans mengusulkan agar otonomi yang disebutkan di atas bersifat mengakar (*embedded*) pada kelompok di luar pemerintah yang masih terkait dalam proses industrialisasi, karena sejalan perubahan tingkat kehidupan masyarakat, tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat akan mendorong demokratisasi dan kemudian menggeser otoritarianisme yang eksklusif dan absolut.<sup>13</sup>

Linda Weiss lebih Lanjut mengusulkan agar “*otonomi*” yang dimiliki oleh birokrasi didukung oleh jaringan kerjasama dengan para tokoh kunci (konglomerat) dalam industri. Pada intinya proses industrialisasi merupakan pekerjaan multi-aspek yang melibatkan banyak pihak. Strategi industri sebaiknya dianggap sebagai manajemen saling ketergantungan (*governed interdependence*).<sup>14</sup>

Dalam kasus Korea Selatan, ciri *developmental state* yang pokok adalah *embedded autonomy*. Pemerintah memiliki otonomi tetapi terlibat dan terkait erat dengan masyarakatnya. Negara yang *embedded* memiliki berbagai saluran terlembaga sebagai sarana bagi aparat pemerintah untuk selalu berinteraksi secara konstruktif dengan sektor swasta yaitu Chaebol melalui proyek kerjasama mendorong pembangunan ekonomi.

---

<sup>13</sup> Peter B. Evans, *Embedded Autonomy : States and Industrial Transformation*, Princeton NJ : Princeton University Press, 1995.

<sup>14</sup> Linda Weiss, *The Making of the Developmental State*, Ithaca, New York: Cornell University Press,

Beberapa saat sebelum Krisis Asia 1997 *developmental state* berjalan pada sistem politik yang otoriter sehingga peran negara masih mendominasi perekonomian. Pembangunan industrialisasi berawal dari pemerintahan otoriter Park Chung Hee (1961-1979) yang memaksa orientasi ekspor pada para Chaebol. Hal tersebut menghasilkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pada era selanjutnya, walaupun pada akhirnya hubungan antara Chaebol dan pemerintah ternyata menimbulkan kolusi, korupsi dan suap-menyuap.

Tahun 1991, Korea Selatan menjadi anggota PBB sehingga harus mentaati aturan tentang perburuhan (ILO) sehingga nuansa demokrasi semakin gencar. Kim Young Sam sebagai Presiden sipil pertama (1992-1997) ikut menerima tuntutan demokrasi tersebut, otonomi birokrasi tak dapat tak lagi dapat dipertahankan hanya dengan didominasi oleh negara. Sebagai respon, Kim Young Sam membangun Komisi Hubungan Industrial namun hasilnya gagal, karena “kebijakan ekspansi global” membuat para pengusaha terlalu bebas mengambil utang luar negeri sebagai penyebab utama krisis finansial di Korea Selatan.

Pemerintahan Kim Dae Jung diawali di tengah krisis dan tuntutan demokrasi semakin merajalela, pada era ini *developmental state* menawarkan *win-win solution*. Pemerintah membentuk Komisi Tripartit antara pemerintah, pengusaha, buruh dan berhasil menandatangani kesepakatan *Great Compromise*



dengan 10 agenda. Komisi ini menjadi parameter percepatan konsolidasi demokrasi dan kebangkitan ekonomi Korea Selatan.

Penjelasan di atas menceritakan dalam dinamika ekonomi politik telah membuat chaebol sebagai pemain utama. Dari rezim militer hingga demokrasi sipil Kim Young Sam chaebol adalah mesin ekspor yang teramat bebas, kebijakan pemerintah meringankan kinerja chaebol. Hasilnya adalah kebebasan untuk berhutang dan munculnya *crony capitalism* antara chaebol dengan pemerintah, hal itu seperti yang terjadi pada Presiden Roh Tae Woo yang melakukan korupsi sebesar 650 juta dolar AS. Setelah Krisis 1997, pemerintah melakukan perombakan terhadap Chaebol, hal ini selain untuk menghadapi dominasi peran Chaebol agar tidak keblabasan sekaligus untuk memperbaiki struktur ekonomi Korea Selatan.

## 2. Teori Korporatisme

Teori korporatisme berasal dari pemikiran restorasi sosial Katolik yang berkembang pada abad 19. Korporatisme merupakan doktrin yang diilhami oleh harapan adanya masyarakat yang bisa ditertibkan secara “organik”, yaitu masyarakat yang diorganisasi dalam fungsi tertentu dan yang relatif otonom, tetapi secara keseluruhan merupakan organisasi yang saling bergantung (*interdependent*).<sup>15</sup> Dalam konteks tertentu, masyarakat serupa itu disebut juga sebagai “corpora”, yaitu konsep yang didasarkan pada *organisme metaphora*

---

<sup>15</sup> Lihat Frans Van Waarden, “Corporatism/Neo-Corporatism”, dalam Gyorgy Szell, eds., *Corporate Encyclopedia of Participation and Co-Management*, Walter de Gruyter, Berlin/New

biologis yang memungkinkan organ-organ tubuh manusia bisa berfungsi dan saling tergantung. Lembaga “corpora” ini merupakan organisasi perantara, yang menjembatani kesenjangan antara negara dan individu, seperti halnya organ-organ tubuh merupakan organisasi penghubung biologis antara masing-masing sel dengan organisme tubuh secara keseluruhan. Sebanyak mungkin fungsi koordinasi dan regulasi harus didelegasikan kepada organisasi tingkat masyarakat ini. Hanya tugas-tugas yang sifatnya koordinasi menyeluruh saja yang merupakan tanggungjawab negara. Dengan demikian “corpora” sesungguhnya meminimalisir intervensi negara atau pemerintah melalui masyarakat yang terswa-organisasi dan terswa-regulasi.

Definisi konseptual Korporatisme menurut **Philippe Schmitter**<sup>16</sup>, yaitu: *Korporatisme adalah bentuk tertentu dari lembaga kepentingan atau sistem perwakilan kepentingan yang, jumlahnya terbatas (tunggal), wajib, non-kompetitif, disusun secara hierarkhis dan dibedakan menurut fungsi organisasinya; diakui atau diijinkan (kalau bukan diciptakan sendiri) oleh negara dan diberi hak monopoli untuk mewakili kepentingan dalam bidangnya masing-masing sebagai imbalan atas kesediannya mematuhi pengendalian pemerintah dalam hal pemilihan pemimpin dan dalam artikulasi tuntutan dan dukungan.*

---

<sup>16</sup> David Held & Carl Schmitt, *Theory & Methods in Political Science*, Macmillan Press Ltd

Salah satu klasifikasi yang paling populer terhadap korporatisme adalah, korporatisme negara (*state corporatism*) dan korporatisme masyarakat (*societal corporatism*)

- a) Korporatisme negara (*state corporatism*), merupakan jenis rezim yang otoriter; merupakan sistem organisasi sosio-ekonomi yang dipaksakan, dibedakan berdasarkan fungsi dan diintegrasikan secara hierarkhis, dan dibentuk secara “*top down*” oleh pemerintah.<sup>17</sup>
- b) Korporatisme masyarakat (*societal corporatism*) atau korporatisme baru, atau korporatisme demokratik/liberal; ditandai dengan partisipasi sukarela, sudah berkembang secara perlahan-lahan sebagai kelompok kepentingan yang sukarela atau lahir dari bawah, dan muncul dalam sistem masyarakat yang liberal.

Dalam dinamika ekonomi dan politik di Korea Selatan, korporatisme negara terjadi pada rezim militer (Park Chung Hee dan Chun Doo Hwan) serta pemerintahan Presiden Roh Tae Woo. Di bawah korporatisme negara tersebut pemerintah memperoleh legitimasi politik dan pertumbuhan ekonomi pesat dengan mengesampingkan kekuatan buruh dan partai oposisi melalui peraturan ketat. Sebaliknya para pengusaha dikonsolidasikan atas nama industrialisasi melalui keterlibatan pemerintah secara langsung dalam proses akumulasi permodalan.

Keberhasilan ekonomi dan transisi menuju demokrasi yang terjadi di akhir tahun 1980-an telah mengantarkan keruntuhan rezim tersebut. Setelah

transisi tersebut, pemerintahan yang demokratik dituntut untuk membersihkan diri dari sisa-sisa rezim yang lama dan juga untuk memenuhi beragam tuntutan masyarakat untuk meneruskan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Sistem perwakilan kepentingan di Korea Selatan bergeser menjadi *pluralisme* pada era Kim Young Sam, perkembangan yang muncul antara lain: munculnya berbagai kelompok kepentingan yang memperkuat masyarakat sipil, konsolidasi yang hegemonistik dari kelas kapitalis, dan perbaikan kelompok buruh. Kebijakan global yang dilakukan presiden Kim Young Sam hanya menguntungkan sektor bisnis saja dan memperbesar ketidakseimbangan kontrol pemerintah. Pada akhirnya hal tersebut memperlemah kontrol pemerintah dan memperkuat sektor bisnis, yaitu Chaebol.

Lemahnya kontrol pemerintah dan dominasi peran Chaebol, menyebabkan Krisis Finansial 1997. Dalam keadaan Krisis Kim Dae Jung melaksanakan reformasi ekonomi dengan mengurangi konflik antara bisnis dan buruh, ia menawarkan sistem korporatisme masyarakat yang digabung dengan pluralisme dengan peran yang berperan secara otonom dalam politik. Hasilnya adalah Komisi Tripartit (*Tripartite Commission*).

### **3. Teori Peran**

Menurut Jack C. Plano, "*Teori peran adalah seperangkat perilaku*

*yang dikendalikan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu*



Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai peranan untuk membangun ekonomi dan politik di negaranya. Sebagai pemegang kendali negara maka pemerintah harus mengatur negara dan masyarakatnya sesuai dengan perannya. Chaebol sebagai perusahaan nasional dan perusahaan multinasional, mempunyai posisi kelompok elit atau konglomerat swasta di Korea Selatan. Ia mempunyai berbagai peran sebagai individu yaitu mencari keuntungan dan sebagai kelompok masyarakat suatu negara harus mematuhi kehendak negara, antara lain berperan sebagai agen pembangunan dan sumber pendapatan negara. Seberapa besar peran suatu individu dan kelompok dalam suatu negara, masih harus diatur oleh negara.

#### **F. Hipotesa**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesa sebagai berikut :

Untuk menghadapi dominasi peran Chaebol dalam politik perekonomian Korea Selatan, maka pemerintah Korea Selatan menerapkan teori *developmental state* dan korporatis masyarakat (*societal corporatism*), yaitu dengan membuat komisi Tripartit sebagai intermediasi atas kepentingan masyarakat dan mengurangi dominasi peran Chaebol sebagai masyarakat Korea

## **G. Jangkauan Penulisan**

Jangkauan penulisan berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik yang akan diangkat, sehingga nantinya pembahasannya tidak mengalami perluasan, yang dapat menyebabkan skripsi menjadi rancu atau kurang fokus.

Untuk itu penulis membuat jangkauan penulisan awal tahun 1980-an hingga tahun 2006. Pembatasan tersebut diambil karena penulis bermaksud menjelaskan dinamika perkembangan ekonomi dan dominasi Chaebol di sekitar tahun 1980-an hingga puncaknya penjelasan mengenai Chaebol sebagai penyebab Krisis finansial di tahun 1997.

## **H. Metode Penulisan**

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode penulisan deduktif, yaitu berdasarkan pada teori yang kemudian dikembangkan dan dijelaskan melalui fakta-fakta yang terjadi.

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) sehingga data yang diperoleh bersifat sekunder, yang didapat dari literatur-literatur, surat kabar, jurnal, majalah, internet dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang diangkat.

## **I. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini dapat tersusun secara sistematis, maka penulis membagi penulisan menjadi lima bab dan sub bab sebagai berikut :

- Bab I Bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan.
- Bab II Bab ini akan membahas mengenai dinamika *Developmental State* yang dialami Korea Selatan.
- Bab III Bab ini membahas tentang hubungan pemerintah dengan Chaebol. Terdiri atas, dominasi peran Chaebol sebagai *engine for growth*, kolusi atau hubungan tertutup antara Chaebol dan pemerintah, hingga Chaebol sebagai penyebab Krisis 1997.
- Bab IV Bab ini menjelaskan tentang peran pemerintah terhadap Chaebol. Pemerintah menerapkan konsep korporatis masyarakat, dengan membentuk Komisi Tripartit dan merestrukturisasi Chaebol untuk mengatasi Krisis Asia 1997 hingga akhirnya Chaebol dapat bersaing kembali di panggung dunia.
- Bab V Bab terakhir ini merupakan penutup berupa kesimpulan dari seluruh bab sebelumnya.